

# INISIASI PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT ISU CYBER CRIME YANG MENGHASILKAN KESEPAKATAN COC DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA (2013-2014)

I Putu Egy Suwidharma<sup>1</sup>, Sukma Sushanti<sup>2</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3</sup>  
<sup>(1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: I Putu Egy Suwidharma<sup>1</sup>, Sukma Sushanti<sup>2</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study to describe issue which resulted in an agreement. The finding in study is that issue cyber crime that is currently happening in Indonesia has a negative impact. The issue of cyber crime can be explored through a theory that offers a framework to discuss the agenda setting process. The agenda setting saw that there were three things contained in the espionage case that happened to President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. First, the public agenda is the focus of attention in a certain period. Second, the policy agenda is an agreement or arrangement made by a group of people. Third, the media agenda is the focus of attention on a certain period.*

**Keywords:** Cyber Crime, Agenda Setting, Agreement, Code of Conduct

## 1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya manusia, mereka menjadi lebih selaras dengan teknologi terkini. Perkembangan tersebut tak membatasi ruang, jarak, dan waktu dalam berkomunikasi (Harjoko, 2010:1). Ruang yang berbeda, jarak dan waktu kini sudah tanpa batas. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah jaringan yang melibatkan keterhubungan manusia dengan lainnya. Menurut Peter Drucker, teknologi adalah integrasi dan komunikasi unit dan aktivitas ("Work and Tools", Technology and Culture) (Hamid, 2016:4).

Aktivitas dalam penggunaan teknologi tidak lagi dapat dipungkiri bahwa semua hal yang dilakukan umat manusia berdasarkan teknologi. Misal saja alat rumah tangga yang ada di kehidupan manusia semua

berdasarkan perkembangan teknologi yang sudah mutakhir atau terbaru. Bahkan umat manusia saling berlomba-lomba ingin memiliki alat-alat atau perlengkapan yang menunjang kehidupannya yang lebih terbaru atau lebih canggih. Hal inilah yang mengakibatkan manusia zaman sekarang agak terlihat konsumtif dari segi pemakai barang.

Berkaitan dengan perkembangan internet merupakan perkembangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat (Anto, 2018:1). Meningkatnya jumlah pengguna media baru dan khususnya internet menyebabkan ledakan jejaring sosial dan akses informasi oleh masyarakat (Heywood, 2017:256). Hampir sepertiga penduduk dunia menggunakan internet (Danuri, 2017).

Pada akhir tahun 2017, diperkirakan lebih dari 100 juta orang menggunakan internet di Indonesia (Internet World State, 2019). Internet tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, bahkan hidup manusia zaman sekarang selalu berdampingan dengan yang namanya internet.

Tercatat oleh APJII pada tahun 2018, data menyatakan pengguna data internet meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2018 berdasarkan survei Indonesia (APJII, 2018). Berikut gambaran pengguna internet di Indonesia yang tercatat di tahun terakhir oleh APJII Indonesia.



Gambar 1.1 Pemakai Internet (APJII, 2018).

Adanya penggunaan internet tentunya berdampak pula pada penggunaannya. Salah satu dampak negatif dari penggunaan internet adalah *cyber crime*. *Cyber crime* sering disebut sebagai kejahatan komputer. *Cyber crime* menggunakan kecanggihan teknologi komputer, dan juga termasuk teknologi telekomunikasi. Hal ini terlihat dalam pandangan Indra Safitri (dalam Maskun, 2014) yang menyatakan bahwa *cyber crime* berkaitan dengan rekayasa teknologi dengan tingkat keamanan dan kredibilitas yang diakses oleh pengguna.

Rekayasa teknologi dapat dibuat dengan tingkat keamanan yang beragam bahkan keakuratannya dapat dideteksi. Di Indonesia, keamanan *cyber* telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, dengan beberapa serangan *cyber* dan perang *cyber* yang terjadi dengan pihak lain.

Misalnya, pada 31 Oktober 2013, Kementerian Luar Negeri Australia merilis laporan kepada Sydney Morning Herald yang menyatakan bahwa Australia telah menyadap pemimpin Indonesia kala itu. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi Indonesia bahwa ancaman *cyber crime* perlu adanya tindakan. Ancaman ruang *cyber* seringkali didominasi oleh aktor non-negara (Rahmawati: 2017). Aktor non negara dimaksud adalah masyarakat umum yang bergerak di bidang *cyber crime* dan berkepentingan dalam penggunaan data pribadi masyarakat atau orang penting yang menghasilkan keuntungan bagi si penyadap atau orang yang menginginkan data pribadi tersebut.

Dalam hal ancaman *cyber*, dunia maya Indonesia semakin hari semakin meningkat dari kasus *cyber crime*. Kasus-kasus tersebut terus meningkat secara signifikan. Berbagai kasus *cyber crime* banyak yang belum terselesaikan meskipun UU ITE telah mengaturnya (Setiawan, 2011:395-442). Seperti dilihat pada tabel berikut.

No	Bulan	Penipuan Online	Penyebaran Konten Provokatif	Pornografi	Akses Ilegal	Perjudian	Pemerasan	Penipuan (Baju/Veritas)	Pemerasan Sistem Elektronik	Intersesi (Ilegal)	Pengubahan Tampilan Situs	Gangguan Sistem	Manipulasi Data	Total
1	Jan-April 2007	649	1048	208	138	32	19	39	18	24	9	4	71	2259
2	Jan-Okt 2009	1617	1789	364	248	35	132	143	148	3	4	9	114	4606
3	Jan-Okt 2010	1781	1724	266	263	35	36	88	43	5	5	1	113	4960
4	Jan-Okt 2017	1430	1157	180	153	24	22	47	35	10	5	13	33	3109
5	Jan-Okt 2016	1570	1047	155	147	26	17	20	0	15	42	71	0	3110
6	Jan-Okt 2015	1494	715	135	107	16	18	49	0	7	27	41	0	2649

Tabel 1.1 Tren Kejahatan Siber se-Indonesia Januari 2015 - Agustus 2020 (Patroli Siber, 2020)

Tabel tersebut menyatakan bahwa tren kejahatan siber terdata secara terus menerus. Pada tabel tertulis bahwa tren kejahatan siber dari Januari 2015 hingga Agustus 2020 mengalami peningkatan. Hal inilah yang membuat Indonesia merasa perlu menertibkan tentang *cyber crime*. Terlebih terdapat kasus besar yang menimpa pemimpin negara Indonesia pada masa itu.

Pada ancaman *cyber crime* yang menimpa SBY, istrinya, serta beberapa pejabat lain di masa pemerintahan SBY, membuat SBY merasa geram. Australia menyadap telepon genggam milik SBY yang dilakukan melalui gedung diplomatik Australia di Jakarta. Di kawasan Asia Pasifik dan Jepang, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dalam hal kejahatan di bidang media sosial. Selain itu, pada tahun 2013 tersiar informasi bahwa Indonesia menjadi negara terbesar dalam hal serangan *cyber* dan risiko *cyber*. Deputi Bidang Kerjasama ID-SIRTII/CC, Muhammad Salman mengatakan, ancaman *cyber* sangat dinamis (dalam Ramadhan, 2017). Sudrajat dalam Merdeka.com mengatakan pula bahwa suatu hal yang lumrah jika suatu negara ingin mengetahui lebih jauh pemimpin negara lainnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Australia dan Indonesia (Merdeka.com, 2013).

Setelah penyadapan terjadi yang dialami oleh SBY, istrinya, dan pejabat lainnya, maka SBY bergegas membuat

kebijakan. Sebelum penyusunan kebijakan, SBY melontarkan kasus penyadapan tersebut ke pihak Australia. Namun, pihak Australia membantah penyadapan itu terjadi. Pemerintah Indonesia dengan tegas memutuskan kebijakan dan mengambil langkah yang tepat untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia sama-sama sepakat untuk melaksanakan penandatanganan kode etik. Pemerintah Indonesia membuat agenda setting sebelum adanya kode etik yang mengikat kedua negara. Hal ini dibantu dari polisi *entrepreneur* yang dalam hal ini adalah pemerintahan dan di luar pemerintahan (agenda media, opini publik, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Tulisan Agenda Setting Function (Studi Kasus Krisis Ekonomi dan Global) tahun 2015. Pada tulisan ini dibahas mengenai kasus krisis yang menimpa Amerika dan global yang dipengaruhi oleh agenda media. Agenda publik telah dipengaruhi oleh agenda media. Pada peristiwa krisis ekonomi Amerika dan global di tulisan ini dipaparkan pula tentang keterkaitan antara agenda publik dan agenda media.

Agenda setting dalam tulisan ini dinyatakan bahwa sebuah media mempunyai kekuatan dalam menggerakkan wilayahnya dan berhak terhadap penentuan sebuah isu yang menonjol atau sering dibicarakan oleh masyarakat umum. Agenda setting diawali dengan sebuah

pendapat media massa dalam menyaring informasi, artikel, atau tulisan yang dipublikasikan. Biasanya ini dilakukan oleh tim meja redaksi yang mengawasi proses pemberitaan. Tim ini dapat disebutkan seperti para wartawan, pemimpin redaksi, serta penyunting gambar. Para tim ini yang menentukan fenomena yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat dan mengetahui yang mana di publikasikan dan yang mana tidak patut di publikasikan atau disembunyikan. Fenomena yang selalu ditonjolkan dalam media disebut sebagai agenda media.

Tiga proses linier terdapat pada tulisan ini. Pertama, isu menjadi prioritas utama dalam pendiskusi di media. Kedua, agenda publik selalu memikirkan semua hal yang dimuat dalam agenda media dan ini sangat berpengaruh besar. Ketiga, agenda kebijakan yang dihubungkan pada agenda politik itu berpengaruh dari adanya agenda media. Hasil analisis tulisan ini didasarkan pada hasil pemberitaan di Gatra yang berhubungan agenda media terhadap ranah publik.

Berdasarkan agenda media, di dapat bahwa siaga kuning ekonomi Amerika berpengaruh ke berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, Hong Kong, dan lain-lain. Beberapa kebijakan oleh pemerintah yang berbeda-beda dikeluarkan di masing-masing negara untuk meredam krisis tersebut seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Norwegia, India, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Australia, Selandia Baru, Arab Saudi, Uni Emirat Arab,

Denmark, Irlandia, Austria, Yunani, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Indonesia.

Dari informasi yang dituliskan di tulisan ini bahwa masyarakat memiliki dampak yang besar bagi kehidupan. Pemberitaan fenomena krisis yang terjadi di Amerika terbukti bahwa agenda setting membawa pengaruh besar kepada masyarakat agar merespon pemberitaan yang terjadi. Media memberitakan fenomena krisis Amerika dan di waktu yang sama masyarakat ikut menanggapi kejadian tersebut. Dari fenomena itu, dapat dinyatakan bahwa agenda setting berperan besar terhadap sebuah fenomena yang terjadi.

Selanjutnya, tulisan kedua dengan judul Pembentukan Opini Publik oleh Media: Cable News Network (CNN) Indonesia dalam 2018 North Korea-United States Singapore Summit tahun 2020. Tulisan ini menginformasikan tentang opini publik dari adanya hal penting yang berkaitan tentang denuklirasi dan perdamaian dunia. CNN Indonesia melaporkan semua hal itu dengan menggiring sebuah isu menjadi opini publik yang dapat dilihat pada sebanyak 135 artikel. Hasilnya dinyatakan bahwa semua isu yang digiring memudahkan sebuah negara bergerak untuk mencapai tujuannya.

Tulisan ini memaparkan tentang opini publik yang dilakukan oleh CNN Indonesia yang memberitakan tentang Kim Jong Un dan Donald Trump. Kedua pemimpin negara ini diberitakan pada tahun 2018 yang berkaitan dengan pertemuannya di Singapura. CNN Indonesia membuat sebuah pemberitaan yang berkaitan dengan pertemuan kedua negara tentang

hubungan diplomatik yang terjalin. Opini publik terus beriringan karena CNN Indonesia mampu memberitakan tentang pertemuan kedua pemimpin tersebut.

Dalam penelitian ditunjukkan bahwa pemberitaan yang dilakukan CNN Indonesia memiliki penilaian yang penting bagi masyarakat dan terus diperbincangkan di ranah umum. Secara terus berita pertemuan itu diberitakan oleh CNN Indonesia setelah satu bulan pertemuan.

Perdamaian dunia dan denuklirisasi ditekankan dalam semua pemberitaan yang dilakukan oleh CNN Indonesia. Dari pemberitaan tersebut masyarakat atau para pembaca dan pendengar mampu beropini terkait fenomena yang termuat dalam berita. Reaksi positif dalam berita juga banyak dimuat oleh CNN Indonesia agar mengisyaratkan antusias dan optimisme dari kedua negara.

Pertemuan tersebut sebenarnya CNN Indonesia ingin melukiskan agar masyarakat mengetahui pihak Amerika Serikat memiliki keinginan untuk berupaya denuklirisasi dilakukan, agar masyarakat dunia merasakan impian perdamaian yang dielukan. Lewat pemberitaan tersebut, CNN Indonesia terus berkeinginan agar bisa mengonstruksi opini publik bahwa Amerika Serikat mampu menggunakan kekuatannya sebagai negara adi daya dalam menciptakan perdamaian dunia.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Riset yang digunakan dengan cara mendeskripsikan temuan yang ada untuk menuliskan hasil dari inisiasi pemerintah Indonesia terkait isu *cyber crime* dengan

agenda setting yang menghasilkan kesepakatan.

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan sebuah hal untuk mengumpulkan dan menjawab permasalahan yang dikaji. Hal inilah langkah awal atau sebuah teknik dalam mengumpulkan data riset dengan cara mengambil data pada bahan bacaan, baik buku, internet, artikel, jurnal, atau sumber lainnya. Teknik ini digunakan berkenaan dengan mempelajari berbagai literatur sebagai acuan dalam pengumpulan data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Alur Riset



Gambar 4.1 Bagan atau alur riset

Kasus penyadapan yang dialami pemerintah Indonesia merupakan sebuah isu penyadapan yang sangat mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia. Dalam kasus tersebut teori agenda setting menjadi tumpuan dalam mengupasnya, karena pemerintah Indonesia ditekan atau diberikan masukan melalui polisi *entrepreneur* (suprastruktural dan infrastruktural).

Agenda setting menjadi berita utama dalam media massa, sehingga yang paling utama bekerja adalah agenda media. Agenda media bekerja membahas topik dan isu yang ada di masyarakat. Indonesia merasa harus melahirkan sebuah kebijakan dari adanya kasus tersebut, agar tidak adanya penyadapan dikemudian hari yang mengganggu hak pribadi masyarakat. Dengan demikian, masa itu harus membuat sebuah kebijakan (agenda kebijakan).

#### **4.2 Inisiasi Pemerintah Indonesia Terkait Isu *Cyber Crime***

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah menjadi perhatian sejak kemerdekaan. Namun banyak perbedaan terjadi di antara kedua negara ini. Cara pemerintah Indonesia dalam menangani urusan luar negeri merupakan salah satu cara negara berfungsi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Australia karena Australia telah beberapa kali terbukti ikut campur. Sejak terjadinya penyadapan yang menimpa pemerintahan Indonesia, hubungan luar negeri antara Indonesia dan Australia menurun.

Susilo Bambang Yudhoyono menagih militer Indonesia dan Australia untuk sementara tidak melakukan latihan militer bersama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selain menghentikan sementara sejumlah kerjasama, beliau juga berupaya keras dalam membentuk sebuah kode etik yang berguna untuk menjaga kerjasama. Indonesia menginginkan adanya protokol yang mengatur kerjasama di berbagai bidang yang wajib dan harus

diikuti. Jika terbukti suatu negara melakukan spionase, cara yang biasa dilakukan adalah dengan mengusir diplomat tertentu dari negara tersebut. Maka dari itu, Indonesia terus berupaya agar sebuah perjanjian dalam menegakkan negara dilakukan.

#### **4.3 Agenda Setting dalam Isu *Cyber Crime* yang Menghasilkan Kesepakatan**

Agenda setting merupakan gagasan, bahwa media ingin didengar dan mereka dengar. Sejarah penetapan agenda dipraktikkan dalam menetapkan agenda. Agenda setting dimulai dengan definisi yang diungkapkan oleh Lippmann dalam teori agenda-setting Bernard Cohen yang sering digunakan bahwa “pers lebih penting dari sekadar sumber informasi dan opini” (Tamburaka, 2012).

Teori agenda setting menekankan pada pengaruh media dalam menciptakan suatu isu (Eriyanto, 2019). Proses penciptaan isu dilakukan dengan cakupan isu yang tinggi, dan disertai dengan mengabaikan isu atau topik lain. Publik kemudian melihat topik yang dibahas dalam jumlah besar sebagai isu penting. Efek ini terjadi karena masyarakat mengandalkan media untuk menemukan peristiwa yang terjadi di luar masyarakat. Media seringkali menjadi sumber informasi utama seseorang. Hal ini tidak mengherankan karena media memutuskan hal yang penting. Tidaklah mengherankan jika media menjadi sumber informasi utama dalam suatu isu, karena

medialah yang menentukan hal yang penting.

Sebagai ilmuwan yang pertama sekali menguji teori ini, Maxwell McComb dan Donald L Shaw kemudian menjadi tokoh utama dibalik teori ini, yang empat tahun setelah penelitiannya (1968-1972) baru mengumumkan ke publik, bahwa risetnya itu menguatkan hipotesis hingga keduanya sepakat menamakan teori tersebut sebagai agenda setting teori. Penelitian menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 1968 itu juga sekaligus menjadi latar belakang sejarah kelahiran teori agenda setting.

Meskipun, jauh sebelumnya sudah ada gagasan atau pandangan para ilmuwan yang cenderung sama dengan fungsi teori agenda setting, sebagai hasil observasi pengaruh media terhadap khalayak. Hanya saja saat itu belum sampai memproklamirkan teori seperti teori agenda setting. Aplikasi teori agenda setting dalam penelitian Chapel Hill, adalah sebuah penelitian sistematis pertama hipotesis penentuan agenda dilakukan oleh McCombs dan Shaw (dalam Eriyanto, 2019).

Pada dasarnya kedua pakar komunikasi ini tertarik untuk meneliti pendapat para pemilih menyangkut isu-isu yang dianggap penting sebagai hasil bentukan pemberitaan mengenai isu-isu tersebut. Mereka meneliti penentuan agenda dalam kampanye presiden tahun 1968 dan membuat hipotesis bahwa media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik yang memengaruhi proyeksi sikap terhadap isu-isu politik.

Masalah-masalah di dunia telah dipelajari berdasarkan agenda setting sebagai berikut. Pada tahun 1896, William Randolph Hearst, penerbit surat kabar terkemuka, mengirim ilustrator untuk meliput kemungkinan pecahnya perang melawan Spanyol dan mengirimkan beritanya kembali ke Hearst. Pengiriman seorang ilustrator ke Havana dengan tujuan membuat cerita perang untuk menjual korannya dan sikap tidak bertanggung jawab Hearst memicu tanggapan, dengan kata lain, terhadap meningkatnya aksesibilitas industri media.

Lincoln Steffens (1931) menggambarkan dalam salah satu bab otobiografinya yang berjudul "I Made a Wave of Evil". Steffan adalah seorang penulis yang bekerja untuk surat kabar New York, the Evening Post. Dia mengatakan selalu ada banyak berita kriminal dari ruang bawah tanah kantor polisi yang bisa diceritakan, tetapi tidak bisa diberitakan di surat kabar. Suatu hari Steffan memutuskan untuk melaporkan salah satu berita, karena menurutnya itu melibatkan keluarga terkenal.

Hingga akhirnya berita tersebut dimuat di berbagai media dan tidak mau ketinggalan dengan kasus kejahatan lainnya. Pada suatu hari, Teddy Roosevelt, seorang mantan komisaris polisi, secara pribadi menyelidiki istilah "gelombang kejahatan" ketika dia diberi penghargaan karena menghentikan gelombang kejahatan itu yang hanyalah masalah, yang telah disebabkan oleh Steffan.

Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan tindakan agenda setting

karena perhatian media massa terhadap suatu isu diangkat karena kepentingannya bagi publik. John D. Marrow (dalam Tamburaka, 2012), menyatakan bahwa dunia teori komunikasi massa itu menarik, karena dunia sederhana bagi pengamat yang mengenal dan sudah mengetahuinya.

Masalah *cyber crime* yang terjadi pada pemerintah Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Isu kejahatan dunia maya dapat dieksplorasi melalui teori agenda setting. Agenda setting bekerja dengan berfokus pada isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat umum, yang merupakan isu-isu kunci dan banyak mendapat perhatian dari berita nasional.

Melihat hal itu, sebenarnya agenda setting itu memunculkan isu *cyber crime* menjadi isu penting di masyarakat dan menjadi perdebatan nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan siber menjadi kepentingan pribadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Media massa mengagendakan segala hal terkait pemberitaan *cyber crime* di kedua negara (Indonesia-Australia).

Tahun 2007 hingga 2009, BIN menginformasikan terdapat adanya pelanggaran dari waktu yang ada pada rentangan itu. Di sisi lain, terjadinya kasus penyadapan, media memberitakan melalui Merdeka.com yang menilai bahwa kala itu, Sudrajat dalam Merdeka.com mengatakan pula bahwa suatu hal yang lumrah jika suatu negara ingin mengetahui lebih jauh pemimpin negara lainnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Australia dan Indonesia (Merdeka.com, 2013).

Pemerintah Australia akan berusaha mengorek lebih dalam informasi tentang mantan Presiden SBY dan anak buahnya. Dari adanya kasus tersebut, maka terjadilah proses penandatanganan kode etik yang berisikan aturan mengikat kedua negara untuk tidak lagi sadap menyadap. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa fakta yang ditetapkan oleh agenda media menyebabkan kedua negara mengalami tindakan yang mengarah pada keputusan mereka.

Indonesia dan Australia telah sepakat untuk menandatangani kode etik tentang kerangka kerjasama keamanan. Kode etik itu berisikan penjelasan saling pengertian dalam kerangka kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia. Berikut isi kesepakatan tersebut.

1. Tidak adanya penggunaan internet atau kepentingan pribadi negara yang dikaitkan satu sama lain sehingga merugikan negara atau tidak lagi adanya penyadapan.
2. Kedua belah instansi dan lembaga terkait untuk melakukan kerja sama intelijen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua negara juga akan memperkuat kerjasama intelijen melalui kesepakatan yang telah disepakati. Dari tidak adanya penyangkalan dan penegasan dari pihak Australia, kekhawatiran terhadap perkembangan Indonesia terkait isu-isu yang muncul dapat dilihat sebagai salah satu alasannya.

Keterkaitan antara fokus isu di berbagai media dan kasus mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono lebih dari sekadar pernyataan sebenarnya yang dibuat oleh Australia. Singkatnya, data menunjukkan bahwa, dari berbagai surat kabar hingga media online, terdapat korelasi yang kuat antara penekanan pada berbagai isu kejahatan dunia maya.

Perspektif agenda setting dalam menentukan media telah diakui tidak hanya sebagai wacana siklus, tetapi juga dalam bentuk konsensus yang muncul dari adanya berbagai opini publik dalam lingkup aktivitas media hingga saat ini dari kedua negara.

Fitur agenda setting dalam hal ini menunjukkan bahwa redaktur, staf, dan lembaga penyiaran berperan penting dalam membentuk realitas politik dalam pemilihan dan penyajian berita. Pembaca tidak hanya belajar tentang suatu isu tertentu, tetapi juga berdasarkan banyaknya informasi yang tersedia dalam berita media massa yang dapat menentukan isu mana yang penting atau media mana yang menetapkan agenda berita.

#### **4.4 Agenda Setting Bekerja Menghasilkan Kesepakatan**

Agenda setting menciptakan kesadaran publik dengan menonjolkan topik yang dilihat, didengar, dibaca, dan diyakini paling penting di media massa. Kasus penyadapan oleh negara Australia terhadap Bapak SBY dan menjadi topik hangat serta telah diangkat ke publik oleh media.

Oleh karena itu, media cenderung mengumpulkan topik-topik potensial dan memiliki nilai berita yang tinggi yang dapat

menarik perhatian publik. Masalah penyadapan dianggap sebagai masalah yang paling penting karena menyangkut keamanan negara. Ketika sebuah media melaporkan penyadapan negara Australia, semua media biasanya melaporkannya juga, dan itu semua adalah bagian dari agenda media.

Setelah adanya agenda setting, kerangka media akan mempelajari bagaimana media menyampaikan berita dan memberi makna. Penyadapan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan oleh berbagai media dengan fokus dan topik yang berbeda.

Kominfo melaporkan standardisasi sistem komunikasi RI 1, Liputan 6 melaporkan hubungan Indonesia dan Australia setelah penarikan duta besar, National Tempo dan Kompas melaporkan kisah penyadapan. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia, mengalami subjek penyadapan yang hampir sama, namun cara mengkonstruksi atau membingkai berita berbeda-beda.

Dalam agenda setting kasus penyadapan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terdapat tiga hal penting. Pertama agenda media bekerja, kedua agenda publik menerima, ketiga agenda kebijakan yang disebut sebagai kesepakatan atau perjanjian dilaksanakan. Berikut pemaparan tiga hal penting dalam agenda setting bekerja terhadap isu *cyber crime* yang menghasilkan kesepakatan.

Agenda media, dalam kasus penyadapan yang pertama kali terjadi pada mantan Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono adalah insiden pribadi yaitu percakapan telepon antara Ibu Kristiani. Walaupun awalnya sudah diberikan peringatan saja oleh Bapak Susilo.

Selain itu, ada juga insiden yang melibatkan beberapa media asing, bahwa mantan orang pertama RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dalamnya, 9 nama orang tersebut tercatat sebagai orang yang tersadap oleh pemerintahan luar negeri. Itu dirilis sebagai bentuk penyadapan telepon sehingga hubungan dua negara menjadi buruk.

Dokumen menunjukkan bahwa *DSD* melakukan pencarian aktivitas SBY dari ponselnya sebanyak sehari sekali dan sejumlah 15 kali. Termasuk mantan Wapres Bapak Budiono, Mantan Wapres Bapak J. Kalla, jebir Kementerian Luar Negeri RI 1.

Agenda publik, setelah dihebohkan oleh berbagai pemberitaan di media massa dan kemudian menimbulkan simpati publik, publik pun meyakini bahwa apa yang terjadi pada RI 1 pada masa itu, Bapak SBY dan lainnya, bisa terjadi pada banyak pihak.

Publik berpendapat bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah representasi dari dirinya sendiri (orang Indonesia) ketika pengalaman yang sama menyebabkan kurangnya hak perlindungan data. Masyarakat percaya bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan dan pemerintah harus bertindak dan bertanggung jawab untuk melindungi warganya di dunia maya.

Agenda kebijakan, tekanan publik untuk campur tangan membantu pemerintah menyelesaikannya. Pada akhirnya akan berujung pada kebijakan.

Kebijakan pemerintah didasarkan pada satu atau lebih kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak untuk mencegah kasus penyadapan berulang. Sangat penting untuk melindungi privasi individu dan negara. Adanya kesepakatan itulah menimbulkan kebijakan baru yang dapat disebut kode etik. Kode etik itu berdampak pada hubungan bilateral antar negara.

#### **4.5 Kesepakatan Kode Etik Tahun 2013-2014**

Protes rakyat Indonesia dan upaya pemerintah telah diabaikan oleh pemerintah Australia, yang telah merenggangkan hubungan kedua negara. Setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat reaksi Australia yang tampaknya tidak menghormati permintaan untuk meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, ia mengambil langkah tegas dengan meminta pemerintah Australia meninjau sejumlah keterlibatan keamanan.

Mantan Presiden, SBY mengaku merasa tidak enak dengan pernyataan Perdana Menteri Australia yang tidak menyesal telah menyadap telepon negaranya. Kekecewaan mantan RI 1 pada masa itu membuatnya harus ada jawaban tegas. Mantan RI 1 kemudian berdiskusi dengan mantan Wapres untuk memperkenalkannya enam poin sebagai berikut.

1. RI 1 menugaskan Menlu Marty N. hal-hal yang menjadi kepentingan nasional termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kedua negara.

2. Saling pengertian terhadap kesepakatan bersama dan dilanjutkan dengan pembahasan kode etik.
3. Adanya kajian ulang terkait isu kode etik yang dilakukan oleh mantan RI 1.
4. Pengesahan dilaksanakan depan pemimpin negara.
5. Kedua negara harus saling mematuhi perjanjian yang sudah diberlangsungkan.
6. Hubungan kedua negara dapat terjalin dengan baik lagi apabila kepercayaan yang dilaksanakan terkait kerjasama dapat dijalankan dengan baik dari segi apapun.

Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan enam langkah untuk menormalkan hubungan antara Indonesia Sebagai negara berdaulat, keduanya perlu saling mengelola perselisihan agar hubungan bilateral keduanya tetap ke arah yang lebih baik. Upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara bisa memakan waktu. Namun demikian, kedua negara tetap menunjukkan kesediaannya untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang keamanan dan intelijen, serta tetap mematuhi perjanjian yang ada.

## 5. KESIMPULAN

Isu *cyber crime* yang saat ini sedang marak antara Indonesia dan Australia. Isu *cyber crime* dapat digali melalui teori yang menawarkan kerangka kerja untuk membahas proses agenda setting.

Agenda setting bekerja dengan melihat isu-isu penting yang menjadi permasalahan utama yang mendapat perhatian besar dari

pemberitaan nasional dan menjadi isu yang dipandang oleh publik sebagai isu penting.

Dalam pembukaan hubungan yang dimulai atas dasar sebuah kesepakatan dapat mempererat jalinan kerjasama antar-institusi kedua negara. Pemerintah Australia menyepakati sebuah kode etik terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia ke Indonesia. Kesepakatan dalam bentuk kode etik ini dibuat agar tidak lagi terjadinya kasus penyadapan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Indonesia.

Pemerintah Australia menyepakati kode etik tersebut yang di inisiasi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, agenda setting menjadi tumpuan terjadinya kesepakatan tersebut, karena pemerintah Indonesia ditekan atau diberikan masukan dari polisi entrepreneur (suprastruktural politik dan infrastruktural politik yang diantaranya seperti parati politik, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, media, opini publik, akademisi, dan lain sebagainya).

Kasus penyadapan yang dialami oleh mantan Presiden RI, SBY serta pejabat tinggi lainnya merupakan isu keamanan yang dianggap penting, karena mengganggu stabilitas serta keamanan pemerintah Indonesia. Begitu pula masyarakat yang menganggap bahwa, kasus ini sangat merugikan hak privasi masyarakat Indonesia. Agenda setting melihat ada tiga hal yang termuat dalam kasus penyadapan yang menimpa mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertama, agenda publik merupakan fokus perhatian dalam suatu periode tertentu. Kedua, agenda kebijakan adalah kesepakatan atau pengaturan yang dibuat oleh sekelompok orang. Ketiga, agenda media adalah fokus perhatian pada suatu periode tertentu. Pemerintah Indonesia menginisiasi isu *cyber crime* yang menghasilkan kesepakatan pemerintah dilakukan berdasarkan agenda setting.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Rusdi. 2018. *Kasus-kasus Cyber Crime sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi yang Meresahkan Masyarakat*. Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat
- APJII. 2018. *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. <https://apjii.or.id/survei2018>
- BBC.com. 2013. *BIN: Australia Menyadap Indonesia sejak 2013*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia)
- Danuri, Muhamad. 2017. *Trend Cyber Crime dan Teknologi Informasi di Indonesia*. Semarang: Teknologi Cipta
- Eriyanto. 2019. *Truth: Media dan Opini Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamid, Firman Maulidian. 2016. *Pengertian Teknologi*. Bandung: UNIKOM
- Harjoko, Agus Tri Prasetyo. 2010. *Cyber Crime dalam Politik Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
- Heywood, Andrew. 2017. *Politik Global*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Maskun, S.H., LLM. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group
- Internet World State. 2019. *Internet Usage in Asia*. URL: <https://www.internetworldstats.com/stats3.htm> diakses tanggal 12 Januari 2019
- Maskun, S.H., LLM. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group
- Merdeka.com. 2013. *Australia Menyadap karena Sangat Tergantung Kepada Indonesia*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/australia-menyadap-karena-sangat-tergantung-kepada-indonesia.html>
- Patroli Siber. 2020. *Tren Kejahatan Siber se-Indonesia*. Data internetsite: <https://patrolisiber.id/statisti>
- Rahmawati, Ineu. 2017. *The Analysis of Cyber Crime Threat Risk Management to Increase Cyber Defense*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara: Vol. 7, No. 2
- Ramadhan, Iqbal. 2017. *Peran Institusi Internasional dalam Penanggulangan Ancaman Cyber*. Universitas Pertamina: Jurnal Populis, Vol 2, No. 4
- Setiawan, Ahmad Budi. 2011. *Peran Government Chief Information Officer (GCIO) dalam Tata Kelola Keamanan Informasi Nasional*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indonesia, Volume 2 No. 4
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda setting Media Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.